

Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi

Pada hari Selasa siang, tanggal 10 Februari 2026, tepatnya pukul 13.30 WIB, Tim dari Inspektorat Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Bapak Mat Sanusi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Pejabat Administrator (JA), Pejabat Pengawas, serta Analis SDM Aparatur di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Sosialisasi Fraud Risk Assessment ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya identifikasi, analisis, serta mitigasi risiko kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya di bidang manajemen kepegawaian.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Inspektorat Provinsi Jambi menyampaikan materi terkait konsep dasar FRA, jenis-jenis risiko fraud yang berpotensi terjadi, serta langkah-langkah pengendalian yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Dalam pemaparannya, Irbansus menegaskan bahwa penerapan Fraud Risk Assessment merupakan bagian penting dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menjadi instrumen strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. Melalui FRA, setiap unit kerja diharapkan mampu mengenali titik-titik rawan fraud pada proses bisnisnya serta menyusun langkah pencegahan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Dengan meningkatnya pemahaman aparatur terhadap FRA, diharapkan tercipta budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelayanan dan pengambilan keputusan kepegawaian.

Pimpinan BKD Provinsi Jambi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran aparatur akan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong terciptanya tata kelola kepegawaian yang profesional, bersih, dan berintegritas.

